

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER**

(Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

REZA BACHTIAR

C100160091

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER**

(Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman)

PUBLIKASI ILMIAH

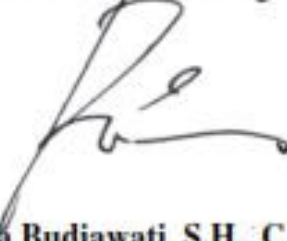
Oleh :

REZA BACHTIAR

C100160091

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Septarina Budiawati, S.H., C.N., M.H
NIK.244

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER

(Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman)

Oleh:

REZA BACHTIAR

C100160091

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari Jumat, 3 Juli 2020

Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Aristya Windiana P., S.H., LL.M., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta
()
Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 29 Juni 2020

Penulis



REZA BACHTIAR

C100160091

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER

(Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman)

Abstrak

Di era industrial sekarang ini, Apotek merupakan tempat yang dituju oleh masyarakat untuk membeli obat karena kesehatan ialah penunjang utama untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar dan aktivitas lainnya. Apotek dapat didirikan oleh siapa saja yang memiliki modal namun harus terdapat tenaga ahli yaitu Apoteker. Apoteker adalah orang yang ahli dibidang kefarmasian dan telah memiliki Surat Ijin Praktek Apotek. Pemilik modal disebut sebagai Pemilik sarana Apotek dan apoteker disebut sebagai Apoteker Pengelola Apotek sehingga tercipta hubungan hukum antar keduanya. Hubungan hukum antara pemilik sarana apotek dengan apoteker pengelola apotek harus berlandaskan perjanjian kerja agar keduanya saling memilik tanggung jawab hak dan kewajiban. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kontruksi hukum perjanjian antara pemilik sarana apotek dengan apoteker pengelola apotek dan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian antara pemilik sarana apotek dengan apoteker pengelola apotek. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode penelitian normatif.

Kata Kunci: perjanjian, kontruksi hukum, tanggung jawab hukum

Abstract

In the current industrial era, Pharmacy is a destination for people to buy medicines because health is the main support for activities such as work, study and other activities. Pharmacies can be established by anyone who has capital but there must be experts, namely pharmacists. Pharmacists are people who are experts in pharmacy and have a Pharmacy Practice License. The owner of capital is referred to as the Owner of the Pharmacy facility and the Pharmacist is referred to as the Pharmacy Management Pharmacy so that a legal relationship is created between the two. The legal relationship between the owner of the pharmacy facility and the pharmacist managing the pharmacy must be based on an employment agreement so that both rights and obligations are mutually exclusive. The purpose of this study was to determine the legal construction of the agreement between the pharmacy facility owner and the pharmacist managing the pharmacy and to find out the legal responsibilities of the parties in the agreement between the pharmacy facility owner and the pharmacist managing the pharmacy. This research is a descriptive research and normative research method.

Keywords: agreements, legal construction, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Apotek merupakan fasilitas kesehatan penting dan khusus yang tugasnya sebagai penjualan obat dan alat kesehatan yang telah distandarisasi keamanan dan kualitasnya. Begitu penting dan berdampak besar apotek sebagai sarana kesehatan, maka pemerintah berupaya melakukan pengawasan guna pencegahan atas penyimpangan tugas yang dilakukan oleh apotek. Ada dua jenis kepemilikan apotek diantaranya apotek milik pemerintah dan apotek milik swasta. Apotek milik pemerintah dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apotek milik swasta dikelola oleh pihak swasta (orang pribadi atau badan).

Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993, Mengenai Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek memiliki makna yang lebih jelas. Secara resmi yang dimaksud dengan “*Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat*”. Sedangkan menurut PP No. 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.¹

Dalam pendirian apotek harus memiliki izin terlebih dahulu, Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. sebelum mendapat izin untuk berjualan obat, apotek tidak dapat langsung menjual obat harus ada pihak yang ahli dalam kefarmasian, pihak ini disebut apoteker. Apoteker juga merupakan seorang Sarjana Farmasi di mana telah melalui tahap kelulusan pada pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Kepmenkes No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek).²

¹Agus N. Cahyo, 2012, *Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*, Jogjakarta : D-Medika, hal. 111.

²Yustina Sri Hartini dan Sulasmono, 2007, *APOTEK Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotik Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotik Rakyat*, Yogyakarta: Uनेversitas Sanata Dharma, hal 1.

Setiap orang yang mampu secara finansial dapat mendirikan apotek walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian, hanya saja ia sebagai pemilik sarana apotek (PSA) agar dapat memenuhi syarat berdirinya apotik maka harus ada apoteker pengelola apotek (APA) sebagai penanggung jawab apotek secara langsung dalam penjualan obat dan alat kesehatan.

Perjanjian dengan objek kerja dalam suatu pekerjaan sangatlah penting karena didalam perjanjian kerja tersebut meliputi hak maupun kewajiban antara pengusaha ataupun orang pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibentuk dan disepakati dihadapan Notaris. Pasal 1601a KUHPerdara menyatakan bahwa "*Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain*" (dikutip dari KUHPerdara).

Perjanjian kerja sah jika telah memenuhi persyaratan, hal ini terdapat di Pasal 52 ayat (1) :

- a. Adanya kesepakatan yang terjadi di antara pihak-pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
- c. Adanya suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya;³

Selain syarat diatas terdapat dua syarat lain, di mana syarat pertama disebut syarat subjektif perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif perjanjian.⁴ Apabila pihak-pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi syarat sah perjanjian kerja huruf (a) serta pada huruf (b) maka berakibat dapat mengakibatkan dibatalkan perjanjian dengan objek kerja tersebut. Jika pihak-pihak tidak melaksanakan syarat sah perjanjian kerja huruf c dan juga huruf d yang berakibat pada perjanjian kerja antara pihak tersebut adalah batal demi hukum.

Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk meneliti isi dan akibat hukum perjanjian kerja antara APA dengan PSA Dhifa Farma berada di kota Sleman di mana dituangkan pada skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS**

³Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, hal. 33.

⁴ Ibid

TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMILIK APOTEK DENGAN APOTEKER (Studi di Apotek Dhifa Farma Sleman).

Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana konstruksi hukum perjanjian antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA)? *Kedua* Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian antara pemilik sarana apotek (PSA) dengan apoteker pengelola apotek (APA)?

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian antara PSA dengan APA *Kedua*, Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian PSA) dengan APA.

2. METODE

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode atau cara pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan pendekatan Doktrinal (Normatif), karena dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang – undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia dalam berperilaku.⁵ Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif,⁶ karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala lokasi yang dipilih dalam melakukan Penelitian ini di Apotek Dhifa Farma Sleman. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Sumber data Data Primer dan sumber data sekunder, Merupakan sumber data yang perolehannya secara langsung dari data yang dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan cara wawancara⁷ dan Merupakan data di mana berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan mana menerapkan teknik dengan pengumpulan beberapa data studi

⁵Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 118.

⁶Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 107

⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *OP. Cit.*, hal. 32.

⁸Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hal. 3.

kepastakaan, yaitu dilaksanakan dengan cara penelitian kepastakaan yang berpedoman atau berasal dari perundang – undangan yang berlaku, buku–buku yang sama dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.⁹ Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode atau cara deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif¹⁰.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana Kontruksi Hukum Perjanjian Antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotek (Apa).

Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kerja yang digunakan antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek ialah perjanjian Kerjasama. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, bentuk perjanjian dengan objek kerjasama di Apotek Dhifa Farma Sleman merupakan suatu akta otentik yang mana dibuat akta tersebut di hadapan pejabat umum yang berwenang¹¹ yakni notaris Sugiyanta, S.H..

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPdata yaitu :

a. Syarat subjektif

1) Sepakat

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kata sepakat ini merupakan persetujuan kedua belah pihak yang hendak mengadakan dan melaksanakan suatu perjanjian kerjasama dalam hal ini adalah perjanjian dengan objek kerja antara APA dengan PSA di Apotek Dhifa Farma Sleman.

Kata sepakat merupakan syarat sah suatu perjanjian karena dari kesepakatan tersebut dapat terjalin perikatan antara

⁹Zainuddin Ali, 2016, Op.Cit, hal. 107.

¹⁰Ibid hal. 107.

¹¹ Purnamasari, Irma Devita. Akta Notaris sebagai Akta Otentik.

<https://www.hukumonline.com/klirik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/> (diakses pada 14 Juni 2020)

pihak pertama yakni APA dan pihak kedua yakni PSA. Sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut pihak pertama yakni Nona Maya Arfania, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan pihak kedua yakni Tuan Puji Prabawa sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) telah menyepakati untuk bekerjasama dalam usaha penjualan obat dan alat kesehatan¹², agar mendapatkan kepastian hukum maka kedua belah pihak bersama-sama membuat perjanjian kerjasama dihadapan Notaris Sugiyanta, S.H.

2) Cakap

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah cakap. Dalam melakukan perikatan cakap merupakan syarat yang harus dipenuhi, karena orang yang tergolong cakap telah sadar dan mengerti akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dari perjanjian kerjasama tersebut para pihaknya adalah pihak pertama Nona Maya Arfania, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Dhifa Farma di Sleman dan pihak kedua Tuan Puji Prabawa sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan subjek atau orang yang telah memenuhi syarat kecakapan dalam pembuatan perjanjian sesuai dengan Pasal 1329 KUHPdata dan 1330 KUHPdata bahwa para pihak tidak sedang berada di bawah pengampuan, dibuktikan dengan adanya identitas yang ditulis pada komparasi perjanjian kerjasama yang mencantumkan tanggal lahir para pihak.

Subjek yang ada dalam perjanjian kerjasama telah sesuai dengan norma dan doktrin. Adanya para pihak tersebut yaitu pihak pertama Nona Maya Arfania, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai APA dan pihak kedua Tuan Puji Prabawa sebagai

² Puji Prabawa, *Pemilik Sarana Apotek "Dhifa Farma"*, wawancara Pribadi, Sleman, 8 Mei 2020, Pukul 15.30 WIB.

PSA, dalam perjanjian kerjasama yang harus melaksanakan isi dari perjanjian untuk memenuhi hak maupun kewajiban yakni pada pihak pertama maupun pihak kedua yakni PSA. Pihak-pihak yakni pihak pertama APA dan pihak kedua PSA telah memenuhi syarat subjektif untuk sah suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 ayat (1), dan (2) KUHPerdara yakni sepakat, serta memenuhi cakap untuk mengadakan perjanjian.

b. Syarat Objektif

1) Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara salah satu syarat sah perjanjian adalah suatu hal tertentu. Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerjasama tersebut adalah bentuk kerjasama para pihak berupa pihak pertama Nona Maya Arfania, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai APA yang bertugas untuk mengelola apotek Dhifa Farma dan pihak kedua Tuan Puji Prabawa sebagai PSA di mana mempunyai tugas menyediakan sarana prasarana penunjang apotek Dhifa Farma.

2) Kausa yang Halal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) yakni salah satu syarat sah perjanjian adalah kausa yang halal (dikutip dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam suatu perjanjian haruslah dilakukan atau dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang baik oleh para pihak yakni Apoteker Pengelola Apotek serta Pemilik Sarana Apotek pada Apotek Dhifa Farma yang berada di Sleman. Di mana pada perjanjian kerja sama kedua belah pihak ini saling menjalankan apa yang tercantum pada perjanjian kerjasama yang telah disetujui dan disepakati. Isi perjanjian dengan objek kerja sama antara (APA) dengan (PSA) Apotek Dhifa Farma di Sleman, mempunyai maksud dan tujuan yang baik di mana tidak merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Dalam

suatu perjanjian dengan objek kerjasama antara APA dengan PSA pada Apotek Dhifa Farma Sleman, telah dilaksanakan sesuai dengan isi yang diperjanjian oleh para pihak. Sehingga perjanjian kerjasama telah terjadi itikad baik. Hal ini perjanjian kerjasama antara pihak-pihak tersebut telah sesuai dan memenuhi dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian ayat (4) kausa yang halal.

Berdasarkan analisis di atas, perjanjian dengan objek kerja sama antara (APA) sebagai pihak pertama dengan (PSA) Apotek Dhifa Farma di Sleman, sebagai pihak kedua merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris Sugiyanta, S.H yang telah sesuai dan memenuhi syarat sah dalam perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat subjektif ayat (1) kata kesepakatan di antara pihak pertama dan kedua, (2) kecakapan dalam pembuatan perjanjian, dan syarat obyektif ayat (3) suatu hal tertentu, (4) kausa yang halal. (Dikutip dari KUHPerdara) Maka akibatnya sesuai dalam Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian kerja sama tersebut di atas mengikat kedua belah pihak di mana para pihak harus melaksanakan isi perjanjian, pihak-pihak yakni APA dengan PSA wajib memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara apabila satu pihak hendak menarik perjanjian, harus memperoleh persetujuan dengan pihak yang lain dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang, namun berdasarkan perjanjian kerja sama di atas tidak ada pihak baik pihak pertama yakni Apoteker Pengelola Apotek (APA) maupun pihak kedua yakni Pemilik Sarana Apotek (PSA) yang menarik perjanjian kerja sama tersebut. Pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, perjanjian

kerja sama tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan tujuan dan maksud yang baik oleh kedua belah pihak agar tercapainya itikad baik oleh pihak APA dengan PSA.

b. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotek (Apa)

Berdasarkan konstruksi perjanjian kerja sama tersebut di atas maka dapat diuraikan bahwa tanggung jawab para pihak dalam adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA)

APA mempunyai hak sesuai dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu terdapat dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Antara APA Dengan PSA Apotek Dhifa Farma di Sleman

- a. Hak Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu **1).** Berhak menerima jasa profesi setiap bulannya oleh pihak kedua atau Pengelola Sarana Apotek (PSA) sebesar Rp. 2.160.000,00 perbulannya dan mendapatkan kenaikan honorarium sebesar 10% per2 tahun. **2).** Mendapat tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji, **3).** Jaminan kesehatan berupa obat-obatan (obat jalan) dengan menunjukkan alat bukti yang sah berupa resep dokter, **4).** Biaya pengganti transport, **5).** Biaya pengganti makan siang, **6).** presentase resep dan omset penjualan sebesar 1%, **7).** Bahwa apabila keluarga Pihak pertama yang hanya terbatas pada suami dan anak-anak menderita sakit yang memerlukan obat-obatan, Pihak kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menebus obat tersebut pada Apotek yang dikelolanya, dengan harga netto, **8).** Bahwa Apoteker. Pengelola. Apotek. (APA). diberikan kesempatan untuk mempunyai saham apotek

sebesar (minimal 25%), **9).** Bahwa Apoteker Pengelola Apotek (APA) diberi tambahan hak cuti minimal 12 hari kerja di luar hari libur regular, **10).** Bahwa khusus untuk Apoteker Pengelola Apotek (APA) wanita diberi hak cuti melahirkan selama minimal 2 (dua) bulan. Namun dalam pelaksanaannya, Apoteker Pengelola Apotek tidak menjalankan haknya yaitu memiliki saham minimal 25% sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

- b. Kewajiban Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu **1).** Mengatur atau mengoperasikan Apotek, Melayani Pembeli dengan Baik dan sopan, **2).** Menjaga nama baik Apotek dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan, **3).** Melakukan pengecekan stok obat¹³

Selain kewajiban diatas terdapat kewajiban yang tertulis didalam perjanjian dengan objek kerja sama yang mana sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak-pihak di mana mengadakan dan membuat perjanjian objek tertentu, terdapat ketentuan pasal 11 Perjanjian. Kerjasama. (APA). dengan. (PSA). Apotek Dhifa Farma Sleman yaitu **1).** Memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Kedua pada setiap bulannya mengenai realisasi, manajemen laba rugi usaha Apotek, **2).** Setiap semester (enam bulan) mengadakan stok opname total, baik saldo kas bank, saldo hutang piutang dan investasi apotek (persediaan obat, alat kesehatan/barang farmasi), **3).** Setiap tahun wajib melaporkan neraca laba rugi usaha apotek, berikut sampai kepada komponen pendukungnya.

- b. Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek (PSA)

³Maya Arfania, S.Farm.Apt., *Apoteker Pengelola Apotek "Dhifa Farma"*, wawancara Pribadi, Sleman, 8 Mei 2020, Pukul 15.00 WIB.

Dalam hal tanggung jawab, Pemilik Sarana Apotek atau PSA mempunyai hak yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian kerja sama dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah disepakati bersama.

- a. Hak-hak Pemilik Sarana Apotek yaitu **1).** Berhak memperoleh laporan secara tertulis kepada Pihak Kedua pada setiap bulannya mengenai realisasi, manajerial laba rugi usaha Apotek, **2).** Mendapatkan laporan setiap tahun neraca laba rugi usaha apotek dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) berikut sampai kepada komponen pendukungnya.
- b. Kewajiban Pemilik Sarana Apotek (PSA).

PSA mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dan memenuhi dengan isi dari perjanjian dengan objek kerja sama yang telah disetujui bersama oleh pihak-pihak yaitu **1).** Pemilik Sarana Apotek (PSA) wajib memberikan jasa profesi setiap bulannya kepada pihak kedua atau Pengelola Sarana Apotek (PSA) sebesar Rp. 2.160.000,00 perbulannya dan mendapatkan kenaikan honorarium sebesar 10% per 2 tahun, **2).** Memberikan tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji, **3).** Memberikan jaminan kesehatan kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) berupa obat-obatan (obat jalan) dengan menunjukkan alat bukti yang sah berupa resep dokter, **4).** Memberikan biaya pengganti transport, **5).** Memberikan biaya pengganti makan siang, presentase resep dan omset penjualan sebesar 1%, **6).** Bahwa apabila keluarga Pihak pertama yang hanya terbatas pada suami dan anak-anak menderita sakit yang memerlukan obat-obatan, Pihak kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menebus obat tersebut pada Apotek yang dikelolanya, dengan harga netto, **7).** Pemilik Sarana

Apotek memberikan kesempatan untuk memiliki saham apotek minimal 25% kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA), 8). Memberikan tambahan hak cuti minimal 12 hari kerja diluar hari libur regular kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA), 9). Memberikan cuti khusus untuk Apoteker Pengelola Apotek (APA) wanita melahirkan selama minimal 2 (dua) bulan.

Selain kewajiban yang telah dicantumkan diatas, pemilik sarana apotek juga berkewajiban melakukan pengecekan sarana prasarana dan fasilitas apotek secara berkala untuk menjamin kenyamanan apotek¹⁴. Terkait jasa profesi Apoteker Pengelola Apotek (APA) terdapat Penyesuaian menurut Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY yakni menjadi Rp. 2.5000.000.¹⁵ maka Pemilik Sarana Apotek (APA) berkewajiban untuk Memberikan jasa profesi sesuai dengan Surat Keputusan tersebut. Selain kewajiban yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, Pemilik Sarana Apotek juga berkewajiban memberikan uang takjil disaat bulan Ramadhan¹⁶

Dalam penerapannya pihak Pemilik Sarana Apotek (PSA) tidak melaksanakan kewajibannya kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) yakni memberikan biaya pengganti transport.

Berdasarkan analisis di atas perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA Apotek Dhifa Farma Sleman menimbulkan tanggung jawab hukum yakni hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi namun tidak ditepati oleh salah satu pihak. Di mana pihak kedua sebagai

¹⁴Puji Prabawa, *Pemilik Sarana Apotek "Dhifa Farma"*, wawancara Pribadi, Sleman, 8 Mei 2020, Pukul 15.30 WIB.

¹⁵ Ibid.

⁴³ Puji Prabawa, *Pemilik Sarana Apotek "Dhifa Farma"*, wawancara Pribadi, Sleman, 8 Mei 2020, Pukul 15.30 WIB.

PSA tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak pertama sebagai APA untuk memberikan biaya ganti transportasi, dalam hal ini wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata PSA harus membayar ganti rugi kepada APA. Perjanjian sebagaimana tertuang dalam QS. Al Maidah ayat : 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu.¹⁷

QS. Al Isra ayat : 34 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Artinya : Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.¹⁸

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak haruslah dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena telah diperintahkan dalam Al-Qur'an tersebut para pihak yang membuat perjanjian harus dan wajib untuk dilaksanakan karena perjanjian yang dibuat juga dimintai pertanggung jawaban oleh Allah.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya :

- a. Bahwa di dalam suatu perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA Apotek Dhifa Farma di Sleman

¹⁷Tafsir Al-Maidah Ayat Pertama Dan Seorang Ahli Filsafat <http://suaraquran.com/?p=186> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020)

⁴⁶TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/4638-surat-al-isra-ayat-34.html> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020)

tersebut adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara. Perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA Apotek Dhifa Farma Sleman, telah sesuai atau memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara.

- b. syarat subjektif terdapat dalam ayat (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, ayat (2) cakap membuat perjanjian,
- c. syarat objektif terdapat dalam ayat (3) suatu hal tertentu, dan ayat (4) kausa yang halal.
- d. Bahwa tanggung jawab hukum oleh kedua belah pihak mencakup tentang hak maupun kewajiban masing – masing para pihak yakni Pihak pertama sebagai Apoteker Pengelola Apotek dengan pihak kedua sebagai Pemilik Sarana Apotek. Di mana PSA tidak melaksanakan kewajibannya kepada APA yakni memberikan pengganti transport sehingga telah terjadi wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdara di mana PSA harus membayar biaya ganti rugi kepada APA. Sebagaimana tertuang dalam QS. Al Maidah ayat 1 dan QS. Al Isra ayat 34.

b. Saran

Sebaiknya dalam menjalankan perjanjian dengan objek kerja sama antara APA dengan PSA, PSA sebagai pihak kedua pada Apotek Dhifa Farma Sleman, di sini harus menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hal-hal telah disepakati atau hal-hal apa saja yang telah ada dalam isi perjanjian tersebut kepada APA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Bogadenta, Aryo. 2012. *Manajemen Pengelolaan Apotek*. Jogjakarta: D-Medika.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Cahyo, Agus N. 2012. *Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*. Jogjakarta : D-Medika.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartini, Yustina Sri dan Sulasmono. 2007. *APOTEK Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotik Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotik Rakyat*. Yogyakarta: Uneversitas Sanata Dharma.
- M. Anief. 2005. *Manajemen Farmasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1995. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Raharjo, Hendri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Satibi, M. Rifqi Rokhman, dst. 2015. *Manajemen Apotek*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satrio. 1993. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Purwokerto: Alumni.
- Sri Hartini, Yustina dan Sulasmono. 2007. *APOTEK Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan Terkait Apotik Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotik Rakyat*. Yogyakarta: Uneversitas Sanata Dharma.

Subekti. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa.

Umar. Muhammad. 2005. *Manajemen Apotik Praktis*. Solo : CV. Ar-Rahman.

Widjaya, Rai. 2002. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Jurnal

Yuli W, Yuliana, Sulastri, Dwi Aryanti R.”Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)”. Jurnal Yuridis. Vol. 5 Nomor 2 (Desember, 2018).

Internet

Hak dan Kewajiban, <http://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/hak-dan-kewajiban.html>. (Diakses Tanggal 21 April 2020).

Pengertian dan Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek, <https://kedaibatcocc.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-dan-tanggung-jawab-apoteker-pengelelola-apotek-apa/> (diakses pada tanggal 16 februari 2020).

Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli, <https://viagrastoreonline-pharmacy.com/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli/> (Diakses Tanggal 21 April 2020).

Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli, <https://www.tokomodemu.co.id/pengertian-kerjasama-menurut-para-ahli/> (Diakses Tanggal 22 April 2020).

Perjanjian Kerja, <https://www.artonang.com/2014/12/perjanjian-kerja.html>, (Diakses Tanggal 23 April 2020).

Pengertian Kerjasama : Manfaat, Tujuan, Unsur, Bentuk, Jenis dan

Contohnya, [https://www.pelajaran.co.id/2019/20/pengertian kerjasama.html](https://www.pelajaran.co.id/2019/20/pengertian%20kerjasama.html),

(Diakses Tanggal 23 April 2020)

Tafsir Al-Maidah Ayat Pertama Dan Seorang Ahli Filsafat

<http://suaraquran.com/?p=186> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020)

TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/4638-surat-al-isra-ayat-34.html> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.